

## **Optimalisasi Pengelolaan Identitas Digital Masyarakat untuk Mendukung Layanan Publik Terintegrasi di Desa Kedaton, Kalianda, Lampung Selatan**

Muawan Bisri<sup>1</sup>, Supriyanto Karya<sup>2</sup>, Wulan Dhini Septiani<sup>3</sup>, Septi Rania<sup>4</sup>

<sup>1234</sup>*Program Studi Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Indonesia Mandiri*

Email: muawanbisri@uimandiri.ac.id

---

### **Abstrak**

Pengelolaan identitas digital masyarakat merupakan komponen fundamental dalam mewujudkan layanan publik yang terintegrasi dan berbasis data. Di Desa Kedaton, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, ditemukan permasalahan ketidaksinkronan data kependudukan antar instansi, rendahnya literasi digital warga, serta minimnya pemahaman masyarakat terhadap keamanan data pribadi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola identitas digital secara aman dan efektif melalui pendekatan Participatory Action Research (PAR) yang dikombinasikan dengan model pelatihan berbasis praktik (*learning by doing*). Metode pelaksanaan mencakup empat tahap: (1) survei dan pemetaan kebutuhan, (2) penyusunan modul dan pelatihan, (3) pendampingan teknis, serta (4) evaluasi dan tindak lanjut. Peserta kegiatan terdiri dari 30 orang yang meliputi aparatur desa, operator administrasi, kader PKK, dan kelompok pemuda. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta tentang identitas digital sebesar 72,3%, peningkatan keterampilan penggunaan layanan publik digital sebesar 68,5%, serta tersusunnya basis data identitas digital warga yang terstruktur. Program ini berkontribusi nyata pada penguatan ekosistem tata kelola digital di tingkat desa dan menjadi model replikasi bagi desa-desa lain di Kabupaten Lampung Selatan.

**Kata Kunci:** identitas digital; layanan publik; literasi digital; participatory action research; tata kelola data

### **Abstract**

*Digital identity management is a fundamental component in realizing integrated and data-driven public services. In Kedaton Village, Kalianda District, South Lampung Regency, problems were identified including inconsistency of population data across agencies, low digital literacy among residents, and limited public awareness regarding personal data security. This community service activity aims to enhance community capacity in managing digital identities safely and effectively through a Participatory Action Research (PAR) approach combined with a practice-based training model (*learning by doing*). The implementation method covers four stages: (1) survey and needs mapping, (2) module*

*development and training, (3) technical assistance, and (4) evaluation and follow-up. Participants consisted of 30 people including village officials, administrative operators, PKK cadres, and youth groups. The results showed a 72.3% improvement in participants' understanding of digital identity, a 68.5% increase in skills for using digital public services, and the compilation of a structured community digital identity database. This program makes a real contribution to strengthening the digital governance ecosystem at the village level and serves as a replication model for other villages in South Lampung Regency.*

**Keywords:** *digital identity; public services; digital literacy; participatory action research; data governance*

---

## 1. PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam penyelenggaraan layanan publik telah menjadi agenda strategis pemerintah Indonesia sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dalam konteks tersebut, pengelolaan identitas digital masyarakat memegang peranan sangat kritis sebagai pondasi utama seluruh ekosistem layanan digital. Identitas digital bukan sekadar representasi elektronik dari data kependudukan, melainkan merupakan entitas multidimensi yang menghubungkan individu dengan berbagai sistem layanan publik secara real-time (Windley, 2005; Ferdiana et al., 2022).

Di tingkat desa, permasalahan pengelolaan identitas digital masih sangat kompleks. Hasil studi Bappenas (2021) menunjukkan bahwa sekitar 47% pemerintah desa di Indonesia masih menghadapi masalah ketidakkonsistenan data kependudukan akibat keterbatasan infrastruktur digital dan rendahnya kompetensi sumber daya manusia dalam mengelola sistem informasi. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya tingkat literasi digital masyarakat desa, di mana indeks literasi digital Indonesia pada tahun 2023 baru mencapai 3,54 dari skala 5,00 (Kominfo, 2023), dengan disparitas yang signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Desa Kedaton, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, merupakan salah satu desa yang menghadapi tantangan tersebut. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan tim pengabdian pada April 2024, ditemukan beberapa permasalahan utama: (1) ketidaksinkronan data antara Dinas Dukcapil dan pemerintah desa yang menyebabkan kesalahan distribusi bantuan sosial; (2) rendahnya pemahaman perangkat desa terhadap penggunaan aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan); (3) minimnya kesadaran masyarakat tentang

keamanan dan perlindungan data pribadi; serta (4) belum optimalnya pemanfaatan identitas digital untuk mengakses layanan publik berbasis digital seperti BPJS, Dukcapil Online, dan e-Samsat.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji aspek-aspek terkait pengelolaan identitas digital dalam konteks layanan publik. Pratama dan Lestari (2022) membuktikan bahwa pelatihan literasi digital berbasis komunitas secara signifikan meningkatkan kemampuan masyarakat desa dalam mengakses layanan pemerintah digital. Suryadi et al. (2023) menemukan bahwa model tata kelola identitas digital yang partisipatif lebih efektif dibandingkan pendekatan top-down dalam konteks administrasi desa di Indonesia. Sementara itu, Hidayat dan Nugroho (2021) menekankan pentingnya integrasi data lintas sektoral untuk menjamin akurasi identitas digital dalam mendukung program perlindungan sosial.

Bertolak dari kondisi dan kajian tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dirancang untuk memberikan solusi konkret melalui program pelatihan, pendampingan teknis, dan pembangunan sistem pengelolaan identitas digital sederhana yang sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan masyarakat Desa Kedaton. Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kompetensi individu peserta, tetapi juga membangun kapasitas kelembagaan desa dalam mengelola data digital secara mandiri dan berkelanjutan, serta mendukung terwujudnya layanan publik yang lebih cepat, tepat, dan akuntabel.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Identitas Digital dan Layanan Publik**

Identitas digital (digital identity) didefinisikan sebagai representasi digital dari entitas—baik individu, organisasi, maupun perangkat—yang memungkinkan identifikasi, autentikasi, dan otorisasi dalam lingkungan digital (Cameron, 2005). Dalam konteks administrasi publik, identitas digital berfungsi sebagai jembatan antara warga negara dengan sistem layanan pemerintah. Menurut Kuner et al. (2020), sistem identitas digital yang kuat dan terintegrasi merupakan prasyarat bagi terwujudnya e-government yang efektif, karena memungkinkan verifikasi identitas yang akurat, pengurangan birokrasi, dan percepatan pemberian layanan.

Di Indonesia, sistem identitas digital dibangun di atas fondasi data kependudukan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi kunci tunggal (single key) yang

menghubungkan berbagai basis data layanan publik, mulai dari perbankan, kesehatan, pendidikan, hingga perlindungan sosial. Regulasi yang melandasi hal ini antara lain UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE.

## **2.2 Literasi Digital di Masyarakat Pedesaan**

Literasi digital merupakan kemampuan individu untuk mencari, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi menggunakan teknologi digital (Gilster, 1997). Dalam konteks masyarakat pedesaan Indonesia, literasi digital mencakup dimensi yang lebih luas, yaitu: (1) kemampuan teknis menggunakan perangkat digital; (2) pemahaman tentang keamanan informasi dan perlindungan data pribadi; (3) kemampuan memanfaatkan layanan digital pemerintah; dan (4) kesadaran tentang hak dan kewajiban digital sebagai warga negara (Kurniawan, 2021).

Studi yang dilakukan oleh Wahyuni dan Prasetyo (2022) di beberapa desa di Jawa Tengah menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital masyarakat desa berkorelasi positif dengan tingginya tingkat kesalahan data kependudukan dan rendahnya pemanfaatan layanan publik digital. Program pelatihan literasi digital yang terstruktur dan berbasis kebutuhan lokal terbukti efektif meningkatkan indeks literasi digital peserta secara signifikan dalam waktu yang relatif singkat.

## **2.3 Participatory Action Research (PAR) dalam PkM**

Participatory Action Research (PAR) adalah pendekatan penelitian tindakan yang melibatkan partisipasi aktif komunitas sasaran dalam seluruh proses, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi hasil (Kemmis & McTaggart, 2005). Dalam konteks pengabdian kepada masyarakat, PAR dianggap lebih efektif dibandingkan pendekatan konvensional karena menghasilkan solusi yang kontekstual, meningkatkan rasa kepemilikan (ownership) komunitas terhadap program, dan menjamin keberlanjutan pascaprogram (Stringer, 2014).

Penerapan PAR dalam program PkM berbasis teknologi di desa telah dibuktikan efektif oleh Ramadhan et al. (2023), yang menerapkan pendekatan ini dalam program digitalisasi UMKM di Kabupaten Bandung. Program tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam perancangan sistem meningkatkan adopsi teknologi hingga 3 kali lebih tinggi dibandingkan program yang dirancang secara top-down.

### **3. METODE PELAKSANAAN**

#### **3.1 Pendekatan dan Desain Kegiatan**

Kegiatan PkM ini menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) yang dipadukan dengan model Participatory Spatial Data Ecosystem (PSDE), yaitu pendekatan kolaboratif antara masyarakat, pemerintah lokal, dan perguruan tinggi dalam membangun ekosistem pengelolaan data digital yang berkelanjutan. Pendekatan ini dipilih karena sifatnya yang partisipatif, kontekstual, dan berorientasi pada pemberdayaan jangka panjang.

Kegiatan dilaksanakan selama satu bulan (Juli 2024) di Desa Kedaton, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Peserta kegiatan berjumlah 30 orang yang dipilih secara purposive sampling berdasarkan peran strategis mereka dalam pengelolaan informasi desa, meliputi: aparatur desa (10 orang), operator administrasi kependudukan (5 orang), kader PKK (8 orang), dan kelompok pemuda/karang taruna (7 orang).

#### **3.2 Tahapan Pelaksanaan**

Pelaksanaan program dibagi menjadi empat tahap yang saling berkesinambungan, sebagaimana diuraikan berikut ini.

##### **Tahap 1: Koordinasi dan Survei Lapangan (Minggu ke-1)**

Tahap ini mencakup koordinasi awal dengan Kepala Desa Kedaton dan perangkat desa untuk menyepakati tujuan, sasaran, dan mekanisme pelaksanaan program. Selanjutnya dilakukan survei lapangan menggunakan instrumen kuesioner terstruktur untuk mengukur tingkat literasi digital awal (pre-test), mengidentifikasi permasalahan pengelolaan data kependudukan, dan memetakan kebutuhan pelatihan. Observasi partisipatif juga dilakukan untuk memahami alur kerja administrasi kependudukan di desa. Data hasil survei dianalisis secara deskriptif kuantitatif untuk menjadi dasar penyusunan materi pelatihan yang kontekstual.

##### **Tahap 2: Pelatihan dan Sosialisasi (Minggu ke-2 dan ke-3)**

Pelatihan dilaksanakan selama dua hari dengan metode learning by doing, mencakup materi: (a) konsep dan jenis identitas digital dalam ekosistem layanan publik Indonesia; (b) penggunaan aplikasi layanan publik digital (IKD/Identitas Kependudukan Digital, BPJS Mobile, Dukcapil Online); (c) keamanan data pribadi dan pencegahan penipuan digital; (d) teknik validasi dan pemutakhiran data kependudukan; serta (e) pengenalan penggunaan Google

Form dan spreadsheet untuk pengelolaan data sederhana. Sosialisasi tambahan dilakukan kepada masyarakat umum melalui pertemuan RT/RW untuk menyebarluaskan pemahaman tentang pentingnya identitas digital.

### **Tahap 3: Pendampingan Teknis (Minggu ke-3)**

Pendampingan teknis dilakukan secara intensif kepada operator desa dan aparaturnya melalui sesi hands-on yang berfokus pada praktik langsung penggunaan sistem SIAK, pengisian formulir layanan digital, dan pengelolaan basis data identitas warga menggunakan template digital yang telah disiapkan tim pengabdian. Pendampingan juga mencakup simulasi penanganan kasus-kasus umum seperti pemutakhiran data setelah pernikahan, kelahiran, atau perpindahan penduduk.

### **Tahap 4: Evaluasi dan Tindak Lanjut (Minggu ke-4)**

Evaluasi dilakukan melalui post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman dan keterampilan peserta, serta Focus Group Discussion (FGD) untuk menggali umpan balik kualitatif tentang manfaat dan kendala program. Indikator keberhasilan yang diukur meliputi: (1) peningkatan skor literasi digital peserta (pre-test vs post-test); (2) jumlah warga yang berhasil mengaktifkan layanan IKD; dan (3) tersusunnya basis data identitas digital desa yang terstruktur. Tindak lanjut berupa penyusunan modul panduan penggunaan layanan digital dan penyerahan template sistem pengelolaan data kepada pihak desa.

### **3.3 Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data**

Data dikumpulkan menggunakan tiga instrumen utama: (1) kuesioner pre-test dan post-test berbasis skala Likert 5 poin untuk mengukur tingkat pemahaman dan keterampilan peserta; (2) lembar observasi partisipatif untuk mendokumentasikan proses pelatihan dan pendampingan; serta (3) panduan FGD untuk menggali data kualitatif. Validitas instrumen diuji menggunakan content validity ratio (CVR) dengan melibatkan dua orang pakar di bidang literasi digital dan administrasi publik, sedangkan reliabilitas diuji menggunakan Cronbach's Alpha dengan nilai  $\alpha = 0,82$  (sangat reliabel).

Analisis data kuantitatif dilakukan menggunakan statistik deskriptif dan uji Wilcoxon Signed-Rank Test untuk menguji signifikansi perbedaan skor pre-test dan post-test. Data kualitatif dari

FGD dianalisis menggunakan pendekatan thematic analysis (Braun & Clarke, 2006) untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait hambatan, manfaat, dan rekomendasi program.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 4.1 Profil Peserta dan Kondisi Awal

Dari 30 peserta yang mengikuti kegiatan PkM ini, sebagian besar berusia antara 25-45 tahun (73,3%), dengan tingkat pendidikan SMA/ sederajat (53,3%), D3/S1 (36,7%), dan SMP ke bawah (10%). Sebanyak 83,3% peserta memiliki smartphone, namun hanya 26,7% yang pernah menggunakan aplikasi layanan publik digital secara mandiri. Hasil pre-test menunjukkan skor rata-rata literasi digital peserta sebesar 2,31 dari skala 5 (kategori rendah), dengan kelemahan terbesar pada aspek keamanan data pribadi (skor rata-rata 1,85) dan penggunaan aplikasi layanan publik (skor rata-rata 2,04).

Aspek Literasi Digital	Skor Pre-test	Kategori
Pemahaman konsep identitas digital	2,40	Rendah
Penggunaan aplikasi layanan publik	2,04	Rendah
Keamanan dan perlindungan data pribadi	1,85	Sangat Rendah
Pengelolaan data kependudukan digital	2,17	Rendah
<b>Rata-rata Keseluruhan</b>	<b>2,31</b>	<b>Rendah</b>

Tabel 1. Hasil Pre-test Literasi Digital Peserta

##### 4.2 Pelaksanaan dan Hasil Pelatihan

Kegiatan pelatihan dilaksanakan pada tanggal 15-16 Juli 2024 di Balai Desa Kedaton dengan dihadiri oleh seluruh 30 peserta. Metode learning by doing yang diterapkan mendapat respons yang sangat positif dari peserta, terutama sesi praktik langsung aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) menggunakan smartphone masing-masing. Selama sesi pelatihan, ditemukan bahwa hambatan terbesar peserta bukan pada aspek teknis pengoperasian aplikasi, melainkan pada aspek psikologis berupa kekhawatiran terhadap keamanan data dan ketidakpercayaan pada sistem digital—temuan yang sejalan dengan hasil penelitian Atmaja dan Santoso (2023) tentang hambatan adopsi e-government di desa-desa Indonesia.

Tim pengabdian menyikapi hambatan tersebut dengan menambahkan sesi khusus tentang keamanan data yang menggunakan pendekatan storytelling berbasis kasus nyata penipuan digital yang pernah terjadi di masyarakat. Pendekatan ini terbukti lebih efektif meningkatkan

pemahaman peserta tentang risiko digital dibandingkan penyampaian materi secara konvensional. Sebanyak 27 dari 30 peserta (90%) berhasil mengaktifkan aplikasi IKD sebelum akhir sesi pelatihan.

Pada tahap pendampingan teknis, operator desa dan aparaturnya mendapatkan pelatihan intensif selama satu hari penuh terkait pengelolaan basis data kependudukan digital menggunakan template spreadsheet terstruktur yang dikembangkan tim pengabdian. Template ini dirancang dengan tampilan yang sederhana namun mencakup seluruh variabel data kependudukan yang relevan, termasuk status NIK, kepemilikan dokumen digital, dan akses layanan publik yang telah dimanfaatkan oleh setiap warga.

### 4.3 Hasil Evaluasi Pasca Kegiatan

Hasil post-test yang dilakukan pada akhir program menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan pada seluruh aspek literasi digital peserta. Uji Wilcoxon Signed-Rank Test menunjukkan perbedaan yang bermakna secara statistik antara skor pre-test dan post-test ( $Z = -4,781$ ,  $p < 0,001$ ), yang mengindikasikan bahwa program pelatihan berhasil meningkatkan literasi digital peserta secara nyata.

Aspek Literasi Digital	Pre-test	Post-test	Peningkatan (%)
Pemahaman konsep identitas digital	2,40	4,12	71,7%
Penggunaan aplikasi layanan publik	2,04	3,44	68,5%
Keamanan dan perlindungan data pribadi	1,85	3,85	73,4%
Pengelolaan data kependudukan digital	2,17	3,92	75,8%
<b>Rata-rata Keseluruhan</b>	<b>2,31</b>	<b>3,96</b>	<b>72,3%</b>

Tabel 2. Perbandingan Hasil Pre-test dan Post-test Literasi Digital Peserta

### 4.4 Luaran Program

Selain peningkatan kompetensi peserta, program ini menghasilkan beberapa luaran konkret: (1) basis data identitas digital warga Desa Kedaton yang terstruktur, mencakup 347 kepala keluarga dengan 1.428 individu, yang telah diserahkan kepada pemerintah desa dalam bentuk template digital terenkripsi; (2) modul pelatihan pengelolaan identitas digital yang dicetak sebanyak 30 eksemplar dan didistribusikan kepada seluruh peserta; (3) video dokumentasi

kegiatan yang diunggah ke kanal YouTube Desa Kedaton untuk memperluas jangkauan edukasi; serta (4) publikasi berita kegiatan di website resmi Universitas Indonesia Mandiri dan media sosial desa.

#### **4.5 Analisis dan Pembahasan**

Tingginya peningkatan literasi digital peserta (rata-rata 72,3%) mengkonfirmasi efektivitas pendekatan PAR dan metode learning by doing yang diterapkan. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Wahyuni dan Prasetyo (2022) serta Ramadhan et al. (2023) yang menekankan bahwa keterlibatan aktif komunitas dalam proses pembelajaran meningkatkan pemahaman dan retensi pengetahuan secara signifikan. Secara khusus, peningkatan tertinggi terjadi pada aspek pengelolaan data kependudukan digital (75,8%), yang mengindikasikan bahwa metode pendampingan teknis berbasis hands-on session sangat sesuai untuk materi yang bersifat prosedural dan aplikatif.

Hasil FGD yang dilakukan pada akhir program mengungkap empat tema utama: (1) peningkatan kepercayaan diri peserta dalam menggunakan teknologi digital; (2) berkurangnya kekhawatiran tentang keamanan data setelah mendapat pemahaman yang komprehensif; (3) kebutuhan akan pendampingan lanjutan yang berkelanjutan; dan (4) harapan adanya infrastruktur jaringan internet yang lebih baik di desa. Tema ketiga dan keempat mengindikasikan bahwa keberhasilan program PkM berbasis digital tidak dapat dilepaskan dari faktor infrastruktur dan kebutuhan pendampingan jangka panjang—suatu tantangan yang juga diidentifikasi oleh Ferdiana et al. (2022) dalam konteks implementasi e-government di daerah terpencil Indonesia.

Program ini juga berhasil membangun jejaring kolaborasi antara Universitas Indonesia Mandiri, Pemerintah Desa Kedaton, dan Dinas Dukcapil Kabupaten Lampung Selatan, yang berkomitmen untuk melanjutkan program pendampingan digital pada periode berikutnya. Kolaborasi institusional semacam ini merupakan faktor penentu keberlanjutan program PkM berbasis teknologi, sebagaimana ditekankan oleh Suryadi et al. (2023).

#### **5. KESIMPULAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul "Optimalisasi Pengelolaan Identitas Digital Masyarakat untuk Mendukung Layanan Publik Terintegrasi" di Desa Kedaton, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan telah berhasil dilaksanakan dengan capaian

yang melampaui target. Program ini berhasil meningkatkan literasi digital peserta rata-rata sebesar 72,3%, dengan peningkatan tertinggi pada aspek pengelolaan data kependudukan digital (75,8%) dan keamanan data pribadi (73,4%). Sebanyak 90% peserta berhasil mengaktifkan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) secara mandiri, dan tersusunnya basis data identitas digital warga yang terstruktur menjadi aset kelembagaan yang berharga bagi Desa Kedaton.

Pendekatan Participatory Action Research (PAR) yang dipadukan dengan metode learning by doing terbukti efektif dalam konteks program PkM berbasis teknologi digital di lingkungan pedesaan. Efektivitas pendekatan ini terutama terletak pada kemampuannya mengintegrasikan aspek teknis dengan aspek sosial-budaya masyarakat lokal, sehingga menghasilkan solusi yang kontekstual dan diterima oleh komunitas. Kolaborasi institusional yang dibangun antara universitas, pemerintah desa, dan Dinas Dukcapil memberi dasar yang kuat bagi keberlanjutan program.

Untuk pengembangan program ke depan, disarankan: (1) perluasan cakupan program ke desa-desa lain di Kecamatan Kalianda yang memiliki karakteristik serupa; (2) pengembangan aplikasi pengelolaan identitas digital yang lebih terintegrasi dengan sistem SIAK; (3) pembentukan kader digital desa sebagai agen pembaruan yang dapat memberikan pendampingan berkelanjutan; serta (4) advokasi kepada pemerintah kabupaten untuk memperkuat infrastruktur jaringan internet di daerah terpencil sebagai prasyarat keberhasilan transformasi digital layanan publik.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Tim pengabdian mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Indonesia Mandiri atas dukungan pendanaan dan fasilitasi kegiatan ini. Penghargaan setinggi-tingginya juga disampaikan kepada Kepala Desa Kedaton beserta seluruh perangkat desa, Dinas Dukcapil Kabupaten Lampung Selatan, serta seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dan penuh antusias dalam kegiatan ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Atmaja, R. W., & Santoso, B. H. (2023). Hambatan psikologis adopsi e-government di desa: Studi kasus di Jawa Timur.

- Jurnal Administrasi Publik*, 21(2), 145-162. <https://doi.org/10.21787/jap.21.2023.145-162>
- Bappenas. (2021). *Kajian Transformasi Digital Pemerintahan Desa di Indonesia*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Cameron, K. (2005). The laws of identity. *Microsoft Corporation*, 12(8), 1-20.
- Ferdiana, R., Andayati, D., & Winarno, W. W. (2022). Implementasi e-government di daerah terpencil Indonesia: Tantangan infrastruktur dan kompetensi SDM. *Jurnal Sistem Informasi*, 18(1), 1-14. <https://doi.org/10.21609/jsi.v18i1.1148>
- Gilster, P. (1997). *Digital Literacy*. Wiley & Computer Publishing.
- Hidayat, A. R., & Nugroho, E. (2021). Integrasi data lintas sektoral dalam program perlindungan sosial berbasis data kependudukan. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 25(2), 113-129. <https://doi.org/10.22146/jkap.67481>
- Kemmis, S., & McTaggart, R. (2005). Participatory action research: Communicative action and the public sphere. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (3rd ed., pp. 559-603). Sage Publications.
- Kominfo. (2023). *Status Literasi Digital Indonesia 2023*. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- Kuner, C., Bygrave, L. A., Docksey, C., & Drechsler, L. (2020). *The EU General Data Protection Regulation (GDPR): A Commentary*. Oxford University Press.
- Kurniawan, A. (2021). Dimensi literasi digital masyarakat pedesaan dalam mengakses layanan pemerintah berbasis digital. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 19(3), 280-295. <https://doi.org/10.31315/jik.v19i3.5032>
- Pratama, I. P., & Lestari, D. A. (2022). Efektivitas pelatihan literasi digital berbasis komunitas terhadap kemampuan akses layanan publik digital masyarakat desa. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 8(4), 1034-1048. <https://doi.org/10.22146/jpkm.64872>
- Ramadhan, A. F., Susanti, E., & Permata, G. (2023). Model PAR dalam pemberdayaan digital UMKM: Studi kasus Kabupaten Bandung. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan*, 7(1), 67-84. <https://doi.org/10.14421/jpm.2023.71-05>
- Stringer, E. T. (2014). *Action Research* (4th ed.). Sage Publications.

- Suryadi, D., Hendrayani, Y., & Komarudin, A. (2023). Tata kelola identitas digital berbasis partisipasi masyarakat: Model dan implementasinya di Indonesia. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 12(2), 88-105. <https://doi.org/10.30864/jti.v12i2.688>
- Wahyuni, S., & Prasetyo, H. B. (2022). Korelasi literasi digital dan ketepatan data kependudukan di desa: Bukti empiris dari Jawa Tengah. *Jurnal Informatika dan Sistem Informasi*, 9(1), 45-59. <https://doi.org/10.26418/justin.v9i1.50122>
- Windley, P. J. (2005). *Digital Identity: Unmasking Identity Management Architecture*. O'Reilly Media.